

Trickle Down Economic, Atribut Produk Bank Syariah Dan Going Concern Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Toto Sukarnoto¹

IAI Bunga Bangsa Cirebon¹

Email : toto4sukarnoto@gmail.com¹

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDB atau PNB riil. Produk inovatif bank syariah berupa *Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA)* yang akan menjadi pembeda dengan bank konvensional diharapkan dapat menjadi *game changer*, karena akan membuka peluang investasi di usaha UMKM dengan bertindak selaku manajer investasi, karena pemodal sebenarnya adalah investor SRIA sendiri. Dengan berbagai atribut produk inovatif dalam meningkatkan peran bank syariah terhadap peningkatan ekonomi umat sehingga keberadaan bank syariah dengan atribut produknya menjadi mitra yang saling membutuhkan dan *trickle down economic* atau ekonomi yang menetes akan memberikan peluang-peluang bagi pelaku ekonomi dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. UMKM akan dapat menyerap tenaga kerja yang besar, sehingga akan mengurangi pengangguran. Pada saat bersamaan dengan berkurangnya pengangguran maka kemiskinan akan berkurang, hal ini dikarenakan tenaga kerja yang terserap oleh UMKM akan memperoleh pendapatan. Adanya peningkatan pendapatan pada gilirannya akan mendorong konsumsi nasional sehingga memacu produksi lebih tinggi dan menjadikan pendapatan nasional menjadi meningkat sehingga proses pembangunan dapat terus berjalan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Kata Kunci: *Trickle Down Economic, Atribut Produk, UMKM*

Abstract

Economic growth is the development of activities in the economy which causes the goods and services produced in the society to increase. Economic growth is an increase in gross domestic product or real gross national product. Islamic bank innovative products in the form of sharia restricted account intermediary (SRIA) which will be the differentiator with conventional banks are expected to become game changers, because it will open up investment opportunities in micro, small and medium enterprises by acting as an investment manager because investors are actually SRIA investors themselves. with a variety of product attributes in enhancing the role of Islamic banks in improving the economy of the people so that the existence of Islamic banks with product attributes to be partners who need each other and trickle down the economy will provide opportunities for economic actors in improving welfare. Micro, small and medium enterprises will be able to absorb a large workforce, thereby reducing unemployment. at the same time as the reduction in unemployment will reduce poverty, this is because the workforce absorbed by micro, small and medium enterprises will get income. an increase in income will in turn encourage national consumption so as to stimulate higher production and increase national income so that the development process can continue and the welfare of the community increases.

Keywords : *Trickle Down Economic, Product Attribute, Micro Small and Medium Enterprise*

PEDAHULUAN

Ekonomi bisa dikatakan tumbuh apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya (Mustika, 2010). Capaian atas pertumbuhan ekonomi sudah seharusnya juga memperhatikan capaian tolak ukur pembangunan yang lain.

Teori *trickle down effect* merupakan salah satu topik penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Teori ini pertama kali digagas oleh Albert Otto Hirschman pada 1954.

Hirschman, mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai proses perubahan dari suatu tipe perekonomian menjadi tipe perekonomian yang lebih maju (Jumadi, 2013).. Pembangunan seimbang ini dapat pula diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor. Sehingga, strategi pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi (Arsyad Lincoln, 2010) Berbeda dengan strategi pembangunan seimbang, pada strategi pembangunan tidak seimbang menekankan bahwa seharusnya investasi dilakukan pada beberapa sektor daripada secara serentak disemua sektor ekonomi. (Arsyad Lincoln, 2010) Hirschman, menyatakan bahwa investasi pada sektor-sektor yang strategis mampu membuka kesempatan investasi baru dan membuka jalan bagi proses pembangunan selanjutnya. (Arsyad Lincoln, 2010) Meskipun pada awal pembangunan tidak seimbang akan menyebabkan ketidakseimbangan dan gangguan dalam kegiatan ekonomi, namun keadaan tersebut akan menjadi perangsang untuk melaksanakan investasi pada masa yang akan datang.

Dilatarbelakangi krisis ekonomi dan moneter tahun 1998 dan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang isinya mengatur peluang usaha syariah bagi bank konvensional, perbankan syariah mulai mengalami perkembangan dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BNI tahun 2000 serta bank-bank syariah dan UUS lain pada tahun berikutnya. Sepuluh tahun setelah UU Nomor 10 tersebut terbit, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tentang sukuk dan Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah pada tahun 2008. Kedua UU tersebut telah ikut mendorong perkembangan syariah. Sampai akhir Desember 2013, terdapat 11 bank syariah dan 24 UUS dengan perkembangan yang baik. (Ikatan Bankir Indonesia, 2014)

Perkembangan ini diwujudkan dalam bentuk yang bervariasi baik dari segi inovasi produk, prinsip, sistem operasionalnya serta pergeseran paradigma sampai pada pengkonversian diri. Perkembangan sistem keuangan syariah semakin kuat dengan

ditetapkannya dasar-dasar hukum operasional melalui UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah dirubah dalam UU No. 10 tahun 1998, UU No. 23 tahun 1999, UU No. 9 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan UU No. 21 tahun 2008 tentang bank syariah. Tentu dukungan regulasi dari pemerintah ini memberikan peluang bagi beroperasinya bank dengan sistem syariah.

Untuk melayani kebutuhan masyarakat, baik konsumen individual maupun konsumen bisnis, bagi Bank syariah semuanya sudah diatur dalam desain kontrak kepatuhan syariah.(Syafii Antonio, 2011) Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan dalam persaingan, tergantung kepada kemampuan Bank-bank syariah untuk menyajikan produk-produk menarik, kompetitif, dan memberikan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pasar industri.(Agustianto, 2020)

Berdasarkan data Bank Indonesia(“www.ojk.go.id/data-statistik-perbankan-indonesiaNo Title,” n.d.), bahwa perkembangan perbankan syariah mengalami pertumbuhan cukup baik akan tetapi masih sangat kecil dengan prosentase kisaran 5% dari perbankan umum.

Data pertumbuhan Bank Umum (dalam milyar rupiah)

Indikator Keuangan	Q4 2015	%	Q4 2016	%	Q4 2017	%	Q4 2018
1 Aset	6.095,908	10,39	6.729,799	9,77	7.387,634	9,45	8.086,346
2 DPK	4.413,056	9,60	4.836,758	9,36	5.289,377	6,45	5.630,448
3 Kredit	4.092,104	7,85	4.413,414	8,35	4.781,931	12,04	5.358,012
4 Laba Tahun Berjalan	133,521	2,96	137,467	21,41	166,903	13,94	190,179

(sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2018, diolah 2020)

Data pertumbuhan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (dalam milyar rupiah)

Indikator Keuangan	Q4 2015	%	Q4 2016	%	Q4 2017	%	Q4 2018
1 Aset	296,262	20,33	356,504	18,98	424,181	12,53	477,327
2 DPK	231,175	20,83	279,335	19,89	334,888	11,03	371,828
3 Pembiayaan	212,996	16,44	248,007	15,20	285,695	12,08	320,193
4 Laba Tahun Berjalan	2,301	28,16	2,949	49,98	4,423	56,77	6,934

(sumber :Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2018, diolah 2020)

Prosentase perbandingan Perbankan Syariah terhadap Perbankan Umum

Indikator Keuangan	Q4 2015	Q4 2016	Q4 2017	Q4 2018
1 Aset	4,86%	5,29%	5,74%	5,90%
2 DPK	5,24%	5,78%	6,33%	6,60%
3 Kredit	5,21%	5,62%	5,97%	5,98%
4 Laba Tahun Berjalan	1,72%	2,15%	2,65%	3,65%

(sumber : diolah 2020)

Dewasa ini perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengalami perkembangan sangat signifikan yang merupakan sektor usaha yang memiliki potensi sangat

besar. Pada tahun 2018 jumlah unit usaha sebanyak 64.194.057 juta atau sekitar 99,99% dari total jumlah usaha di Indonesia meningkat dibanding tahun 2017 yang sebanyak 62.922.617 atau menambah sebanyak 1.271.440 unit usaha (2,02%) . Dari tenaga kerja yang diserap di sektor UMKM menyerap sebanyak 116.978.631 di tahun 2018 atau sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2017 yang menyerap 116.431.224 tenaga kerja atau meningkat sebesar 0,47%. (“www.depkop.go.id/data-umkm,” n.d.) Dari kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2017 diperoleh 60,90%, dengan PDB keseluruhan sebesar Rp.12.840 triliun dan *share* dari sektor UMKM sebesar Rp.7.820 triliun. Pada tahun 2018 nilai kontribusi yang disumbangkan sektor UMKM mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp.754 triliun atau menjadi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto Nasional yang besarnya Rp.14.038 triliun hal ini berbanding terbalik dengan sektor usaha besar yang mengalami penurunan yang mana pada tahun 2017 menyumbang 39,10% dari PDB sedangkan pada tahun 2018 hanya menyumbang 38,93%. (“www.depkop.go.id/data-umkm,” n.d.)

Tabel 11. Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Akad - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
(Financing and Non Performance Financing based on type of Shariah-compliant contract of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units)
Miliar Rp (Billion IDR)

Indikator	2015	2016	2017	2018											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
1. Pembiayaan Bagi Hasil	75.533	93.713	118.651	114.646	115.997	119.050	119.213	122.026	126.899	128.097	134.221	136.892	139.146	138.141	145.507
NPF	3.414	3.272	4.175	4.717	4.874	4.674	5.168	5.193	4.030	4.097	4.119	4.150	4.619	4.592	4.205
a. Mudharabah	14.820	15.292	17.090	15.821	15.611	16.770	16.734	16.672	15.803	15.044	14.624	15.673	16.578	16.450	15.866
NPF	323	401	327	420	438	462	478	465	280	293	285	270	374	382	359
b. Musyarakah	60.713	78.421	101.561	98.825	100.386	102.280	102.479	105.355	111.097	113.053	119.596	121.218	122.568	121.691	129.641
NPF	3.091	2.871	3.847	4.297	4.437	4.212	4.690	4.729	3.750	3.804	3.834	3.880	4.245	4.210	3.845
c. Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Piutang	126.832	145.145	157.814	156.821	156.783	158.315	159.227	160.170	158.480	159.564	159.350	163.379	163.553	163.792	164.088
NPF	5.643	6.364	6.698	7.035	7.044	6.182	6.303	6.439	5.411	5.602	5.626	5.584	5.666	5.646	4.712
a. Murabahah	122.111	139.536	150.276	149.299	149.339	150.414	150.937	151.987	150.666	151.555	150.772	154.845	154.756	154.893	154.805
NPF	5.502	6.258	6.588	6.904	6.927	6.100	6.155	6.287	5.321	5.507	5.541	5.494	5.554	5.521	4.489
b. Qandh	3.951	4.731	6.349	6.317	6.217	6.918	6.908	6.820	6.424	6.005	7.138	7.039	7.280	7.347	7.874
NPF	121	90	96	112	98	64	128	132	70	71	61	65	86	99	159
c. Istishna'	770	878	1.189	1.205	1.228	1.283	1.322	1.363	1.391	1.404	1.440	1.496	1.517	1.551	1.609
NPF	20	16	14	19	20	18	20	20	20	24	24	25	26	26	24
3. Pembiayaan Sewa (Ijarah)	10.631	9.150	9.230	9.164	9.316	9.257	9.314	9.560	9.642	9.762	9.941	10.248	10.180	10.578	10.597
NPF	191	661	181	236	234	197	225	224	232	230	289	271	216	221	215
a. Pembiayaan Sindikasi	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Pembiayaan secara Channelling	8	6	0	0	0	2	2	0	0	0	4	15	33	84	165
NPF	-	-	0	0	0	2	2	-	-	-	-	0	0	0	3
c. Pembiayaan secara Executing	-	-	29	29	29	28	28	28	27	27	27	27	26	26	25
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Pembiayaan Sewa Lainnya	10.463	9.144	9.201	9.135	9.287	9.227	9.284	9.532	9.614	9.735	9.910	10.206	10.121	10.469	10.407
NPF	191	661	181	236	233	195	223	224	232	230	289	271	216	221	211
4. Salam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Pembiayaan	212.996	248.007	285.695	280.631	282.096	286.621	287.755	291.756	295.021	297.423	303.512	310.519	312.879	312.511	320.193
NPF	9.248	10.298	11.054	11.988	12.152	11.052	11.696	11.857	9.673	9.929	10.034	10.005	10.502	10.458	9.132

Berdasarkan data dari Statistik Perbankan Syariah Desember 2018 jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan skema profit sharing baik mudharabah maupun musyarakah sebesar Rp.145,5 Triliun dengan NPF pembiayaan bermasalah Rp.4,02 Triliun dengan prinsip mudharabah Rp.15,8 Triliun NPF Rp.359 Miliar dan musyarakah Rp.129,6 Triliun NPF Rp.3,85 Triliun. Sementara total pembiayaan yang disalurkan total sebesar Rp.320,2 Triliun dengan NPF Rp.9,13 Triliun. (“www.ojk.go.id/data-statistik-perbankan-syariah- Indones.,” n.d.)

Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah berdasarkan penggunaan dan kategori usaha UMKM dan bukan UMKM, pembiayaan berdasarkan keperluannya pembiayaan

UMKM modal kerja Rp.37,6 Triliun NPF Rp.2,068 Triliun dari total pembiayaan modal kerja yang disalurkan Rp.105,05 Triliun NPF Rp.3,689 Triliun, kemudian pembiayaan UMKM investasi Rp.24,646 Triliun NPF Rp.1,014 Triliun dari total pembiayaan investasi Rp.75,730 Triliun NPF Rp.3,236 Triliun.

Tabel 13. Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
(Financing and Non Performance Financing based on Type of Usage and Business Category of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit Bank)
Miliar Rp (Billion IDR)

Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha	2015	2016	2017	2018											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1. Modal Kerja	75.949	87.363	96.825	94.593	94.490	97.471	97.599	98.656	102.091	101.031	102.515	103.479	103.555	100.738	105.055
a. UMKV	33.382	35.327	37.968	36.497	36.322	37.440	36.093	36.333	37.441	37.345	37.773	38.132	37.895	37.304	37.583
NPF	2.275	2.123	2.196	2.352	2.342	2.306	2.439	2.442	2.118	2.139	2.159	2.243	2.427	2.274	2.063
b. Bukan UMKV	46.567	51.535	61.957	58.096	58.168	60.031	58.476	60.323	64.650	63.685	64.742	65.347	65.671	63.434	67.472
NPF	2.343	2.372	2.916	3.315	3.337	2.924	2.825	2.934	2.120	2.191	2.102	1.854	1.532	1.752	1.621
2. Investasi	51.990	60.342	66.348	66.938	67.331	67.532	67.008	67.831	68.031	68.956	71.827	72.693	73.614	74.793	75.730
a. UMKV	16.909	16.703	21.111	21.277	21.211	21.425	22.496	22.657	22.454	22.533	20.792	21.195	21.070	24.055	24.645
NPF	1.136	1.744	1.140	1.275	1.323	1.230	1.324	1.394	1.135	1.154	1.157	1.137	1.125	1.151	1.014
b. Bukan UMKV	34.781	41.339	45.737	45.660	46.420	46.077	44.642	45.174	45.696	46.422	51.035	51.491	52.544	50.741	51.084
NPF	1.189	1.522	2.593	2.517	2.598	2.294	2.494	2.392	1.999	2.012	2.127	2.359	3.107	2.993	2.222
3. Konsumsi (Eukan UMKV)	61.357	100.502	116.021	116.101	116.975	121.348	123.178	126.258	124.899	127.437	129.159	134.372	136.639	136.977	139.403
NPF	2.005	1.937	2.208	2.529	2.551	2.409	2.624	2.695	2.300	2.433	2.459	2.405	2.309	2.349	2.205
Total Pembiayaan	212.996	248.007	285.995	280.531	282.096	286.521	287.755	291.756	295.021	297.423	303.512	310.519	312.879	312.511	320.193
Total NPF	9.248	10.298	11.054	11.988	12.152	11.052	11.696	11.857	9.673	9.929	10.034	10.005	10.502	10.458	9.132

Namun untuk memaksimalkan potensi tersebut UMKM menghadapi sejumlah permasalahan. Masalah utama yang hingga kini masih menjadi kendala dalam pengembangan UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya UMKM mengakses sumber permodalan. Bagi lembaga keuangan, kendala utama untuk memberikan bantuan modal disebabkan sulitnya menilai UMKM yang *feasible* dan *bankable* yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pemberian kredit. Di samping itu sebagian besar UMKM belum melakukan pemisahan keuangan antara keuangan pribadi dengan usaha. (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2013)

Tiga krisis pada tahun 1998, 2008, dan krisis Eropa 2011 menunjukkan UMKM usaha mikro dinilai cukup berhasil menahan laju dampak krisis. Hal ini dikarenakan karakteristik UMKM yang memproduksi barang kebutuhan sehari-hari dari pada barang mewah; bersifat lokal dalam produksi dan pemasaran, lebih adaptif dan tidak dibebani oleh biaya administrasi yang mahal, lebih mudah berinovasi dalam pengembangan produk, fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan pasar yang cepat lebih baik dibandingkan usaha besar.

Secara faktual, di tengah tantangan kondisi keuangan global, sektor usaha mikro yang dianggap tidak layak bank justru lebih mampu bertahan dibandingkan dengan usaha menengah dan besar yang telah lama menjadi mitra perbankan.

Keberadaan perbankan syariah bukan hanya sekedar menawarkan konsep dalam operasional kegiatannya, namun juga harus menawarkan berbagai produk inovatif dan solutif

dengan berbagai atributnya yang mudah dipahami dan diterapkan yang memberikan manfaat bagi umat khususnya sektor UMKM bisa dijadikan *bussines role model* yang akan

memberikan dampak ekonomi yang dirasakan banyak manfaat bagi pelaku ekonomi UMKM sehingga tercipta suatu sistem *sharia economics* yang berkelanjutan untuk UMKM serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Berbagai pencapaian dan ekpektasi di atas, menarik untuk diteliti lebih lanjut, benarkah perbankan syariah dengan berbagai atribut produknya mampu menjalankan fungsinya terhadap pertumbuhan perekonomian, terutama sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Secara teoritis, hal tersebut dimungkinkan, karena kecenderungan perbankan syariah untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor ritel akan meningkatkan investasi sehingga menstimulus usaha-usaha mikro. Kecil dan menengah ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, ada hal yang menarik untuk diteliti sehingga dalam penelitian ini diambil judul **“Trickle Down Economic, Atribut Produk Bank Syariah dan Going Concern Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”**.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, karena pendekatan kualitatif mempunyai ciri-ciri antara lain : mempunyai setting yang aktual, peneliti menjadi instrumen kunci, data biasanya bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan *meaning* (pemaknaan) tiap even adalah merupakan perhatian yang esensial.

Fenomenologis, karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peristiwa sosial kemasyarakatan untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil di lapangan dan juga dapat mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (*hidden value*), lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti. (Anselm Strauss, 2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang.(Wijono, 2005) Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, output per kapita mengaitkan aspek output total (GDP) dan aspek jumlah penduduk, sehingga jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka tertentu yang didorong oleh proses

intern perekonomian (*self generating*). Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk dan apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. (Tulus Tambunan, 2001)

Teori *trickle down effect* merupakan salah satu topik penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di negaranegara yang sedang berkembang. (Laksani, 2010) Teori ini pertama kali digagas oleh Albert Otto Hirschman pada 1954. Teori *trickle down effect* menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata. *Trickle Down Effect* merupakan salah satu pendekatan dalam strategi tidak langsung pembangunan ekonomi untuk pemeratakan kesejahteraan yang menekankan pada munculnya pertumbuhan ekonomi. Dikatakan tidak langsung karena proses pemerataan kesejahteraan dilakukan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sektor utama dan kemudian sektor utama tersebut akan menyebarkan hasil pertumbuhan ekonomi tersebut ke sektor lainnya. Dengan adanya proses penyebaran tersebut diharapkan akan membawa perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Perbankan syariah dalam istilah internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau disebut dengan *interest-free banking*. (Muhammad, 2005) Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberi pinjaman dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang peroperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbankan syariah dalam menjalankan operasional perusahaannya berbeda dengan bank konvensional.

KNKS bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mendorong perbankan syariah di Indonesia untuk mengembangkan produk investasi dengan akad *mudharabah muqayyadah*. Akad ini dinilai memberikan keunikan pada produk perbankan syariah dibanding dengan produk perbankan konvensional. Dengan akad ini investor dapat memilih proyek atau aset produktif yang ingin dibiayai secara langsung sesuai dengan kriteria yang ditentukan masing-masing investor. (“<https://knks.go.id/isuutama/16/sria-investasi-baru-produk-keuangan-syariah>,” n.d.), melalui SRIA, perbedaan bank syariah dan bank konvensional akan jelas terlihat sehingga masyarakat tidak akan lagi mempertanyakan apa beda bank syariah dan bank konvensional. Produk ini diharapkan dapat menjadi *game*

changer, karena selain membuka peluang investasi di usaha UMKM juga membuka peluang bank syariah bisa membiayai proyek besar dengan bertindak selaku manajer investasi, karena pemodal sebenarnya adalah investor SRIA sendiri. SRIA menjadi produk penghubung antara perbankan syariah dan pasar modal. SRIA dibangun dengan menggunakan skema *mudharabah muqayyadah* dimana investor menanggung risiko atas investasi tersebut, bank hanya selaku manajer investasi hanya akan menanggung risiko apabila berbuat lalai, fraud atau melanggar kontrak. Dengan berbagai atribut produk inovatif dalam meningkatkan peran bank syariah terhadap peningkatan ekonomi umat sehingga keberadaan bank syariah dengan atribut produknya menjadi mitra yang saling membutuhkan dan *trickle down economic* atau ekonomi yang menetes akan memberikan peluang-peluang bagi pelaku ekonomi dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Penyebutan usaha mikro kecil dengan istilah *sektor informal* digunakan sejak akhir tahun 1970-an. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Hart seorang antropolog sosial, yang memperkenalkan konsep 'sektor informal' sebagai bagian dari tenaga kerja perkotaan di luar perusahaan sektor public maupun swasta. Sektor ini muncul pada awalnya sebagai tanggapan terhadap proliferasi wirausaha dan tenaga kerja lepas di kota Dunia Ketiga; tetapi kemudian digunakan untuk menggambarkan deindustrialisasi 'tersembunyi'. Disebut dengan informal karena sulit menentukan bentuk perlindungan yang bisa diterapkan karena sector usaha ini tidak memiliki legalitas. (Keith Hart, 1973) Selain disebut sebagai usaha informal dan ekstra legal, usaha mikro kecil juga dikenal dengan istilah ekonomi rakyat, perekonomian rakyat ataupun ekonomi kerakyatan. Perekonomian rakyat mengandung makna yang spesifik, jika ekonomi rakyat menggambarkan tentang pelaku ekonominya, maka perekonomian rakyat lebih menunjuk pada objek atau situasinya. Makna yang lebih luas ada dalam ekonomi kerakyatan yang mencerminkan suatu bagian dan sistem ekonomi. Dengan demikian, jika dilihat dari terminologi, maka yang dimaksud dengan ekonomi rakyat adalah ekonomi seluruh rakyat Indonesia yaitu usaha ekonomi yang tegas-tegas tidak mengejar keuntungan tunai, tetapi dilaksanakan untuk (sekedar) memperoleh pendapatan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan-kebutuhan keluarga lain dalam arti luas, yang semuanya mendesak dipenuhi. (Mubyarto, 2002) Namun demikian, dalam konteks yang berkembang, istilah ekonomi rakyat muncul sebagai akibat ketidakpuasan terhadap perekonomian nasional yang bias kepada unit-unit usaha besar. Oleh karena itu, makna ekonomi rakyat lebih merujuk pada ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia, yang umumnya masih tergolong ekonomi lemah, bercirikan subsisten (tradisional), dengan modal dan tenaga kerja keluarga, serta teknologi sederhana. (Edy Suandi

Hamid, n.d.).

Peranan UMKM akan dapat menyerap tenaga kerja yang besar, sehingga akan mengurangi pengangguran. Pada saat bersamaan dengan berkurangnya pengangguran maka kemiskinan akan berkurang, hal ini dikarenakan tenaga kerja yang terserap oleh UMKM akan memperoleh pendapatan. Adanya peningkatan pendapatan pada gilirannya akan mendorong konsumsi nasional sehingga memacu produksi lebih tinggi dan menjadikan pendapatan nasional menjadi meningkat sehingga proses pembangunan dapat terus berjalan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Tetapi jika UMKM tidak berkembang dan tenaga kerja tidak terserap dari sektor ini, maka jumlah pengangguran akan meningkat dan konsumsi akan menurun. Hal ini tidak menstimulus produksi nasional dan berdampak pada penurunan pendapatan nasional dan akhirnya bisa berakibat pada terjadinya krisis ekonomi.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2017		Tahun 2018		Perkembangan Tahun 2017-2018	
			Jumlah	Pangsa %	Jumlah	Pangsa %	Jumlah	%
1.	PDB atas dasar harga berlaku (A+B)	(Rp.Milyar)	12.840.859,0		14.038.598,5		1.197.739,6	09,33
	A. UMKM	(Rp.Milyar)	7.820.282,6	60,90	8.573.895,3	61,07	753.612,8	09,64
	- Usaha Mikro	(Rp.Milyar)	4.827.398,9	37,59	5.303.075,7	37,77	475.676,8	09,85
	- Usaha Kecil	(Rp.Milyar)	1.234.334,1	09,61	1.347.104,3	09,60	112.770,2	09,14
	- Usaha Menengah	(Rp.Milyar)	1.758.549,6	13,69	1.923.715,4	13,70	165.165,7	09,39
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp.Milyar)	5.020.576,4	39,10	5.464.703,2	38,93	444.126,8	08,85
2.	PDB atas dasar harga konstan 2000 (A+B)	(Rp.Milyar)	9.504.148,6		9.995.305,9		491.157,3	05,17
	A. UMKM	(Rp.Milyar)	5.445.564,4	57,30	5.721.148,1	57,24	275.583,7	05,06
	- Usaha Mikro	(Rp.Milyar)	2.804.585,0	29,51	2.927.890,5	29,29	123.305,4	04,40
	- Usaha Kecil	(Rp.Milyar)	1.272.701,4	13,39	1.355.705,7	13,56	83.004,3	06,52
	- Usaha Menengah	(Rp.Milyar)	1.368.277,9	14,40	1.437.551,9	14,38	69.273,8	05,06
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp.Milyar)	4.508.584,3	42,70	4.274.157,9	42,76	215.573,6	05,31

(Sumber : Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2017- 2018 Kementerian Koperasi dan UMK, diolah tahun 2020).

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat dilihat bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dan berpotensi memberikan kontribusi yang cukup besar dalam struktur perekonomian nasional.

Paradigma pertama adalah *paradigm modernisasi*. Gagasan utamanya terletak pada akar persoalan yang dihadapi UMKM. Menurut paradigma ini persoalan UMKM terletak pada keterbelakangan budaya, kebodohan, dan kemiskinan absolute yang ada pada diri pelaku UMKM. Dengan demikian inti permasalahan terletak pada pelaku UMKM.

Paradigma kedua adalah *paradigma liberal* yang melihat permasalahan UMKM dari sisi tatanan sosial yang tidak berfungsi secara baik, kurangnya peran pemerintah dalam memberikan kesempatan berusaha bagi semua pihak. Menurut paradigma liberal, permasalahan UMKM dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar pada UKM (*basic problems*), antara lain berupa permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non formal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran.
2. Permasalahan lanjutan (*advanced problems*), antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor.
3. Permasalahan antara (*intermediate problems*), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut antara lain dalam hal manajemen keuangan, agunan dan keterbatasan dalam kewirausahaan. (Setyobudi, 2007)

Untuk meningkatkan peranannya UMKM memerlukan dukungan kebijakan baik dari lembaga keuangan maupun pemerintah. Secara garis besar kebijakan yang dapat dilaksanakan melalui :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pelatihan-pelatihan kepada pengusaha UMKM perlu dilakukan, mengingat teknologi produksi semakin berkembang sehingga menuntut pengusaha UMKM untuk terus menerus meng-*upgrade* pengetahuannya. Pemanfaatan internet memungkinkan UMKM melakukan pemasaran dengan tujuan pasar global, sehingga peluang menembus ekspor terbuka luas, di samping itu biaya transaksi juga bisa diturunkan. (SIPUK dapat diakses melalui website Bank Indonesia/, n.d.)

2. Pengembangan Aspek Keuangan

Salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM adalah aspek permodalan. Berdasarkan beberapa penelitian, lambannya akumulasi kapital di kalangan UMKM merupakan salah satu penyebab lambannya perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor UMKM. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu dalam pemberdayaan UMKM pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan.

3. Pengembangan Aspek Manajemen Pemasaran

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya UMKM tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung pembangunan prasarana. Beberapa prasarana infrastruktur ini misalnya adalah prasarana jalan, pelabuhan, terminal, penyediaan air bersih dan ketersediaan listrik.

Pendekatan kluster industri, potensi unggulan yang ada di daerah dapat berkembang dan memiliki daya saing sehingga diharapkan, berkembangnya potensi unggulan tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk menarik sektor swasta dalam melakukan investasi di daerah. Berbagai kebijakan dalam upaya pengembangan potensi unggulan sebenarnya sudah diterapkan oleh pemerintah seperti peluncuran *road map* pengembangan kompetensi inti daerah dan kebijakan *one village one product* (Hempri Suyatna, 2010)

4. Pengembangan Aspek Manajemen Operasional

Di negara-negara maju keberhasilan usaha kecil menengah ditentukan oleh kemampuan akan penguasaan teknologi. Strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan akses teknologi bagi pengembangan usaha kecil menengah adalah memotivasi berbagai lembaga penelitian teknologi yang lebih berorientasi untuk peningkatan teknologi sesuai kebutuhan UKM, pengembangan pusat inovasi desain sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan pusat penyuluhan dan difusi teknologi yang lebih tersebar ke lokasi-lokasi Usaha Kecil Menengah dan peningkatan kerjasama antara asosiasi-asosiasi UKM dengan perguruan Tinggi atau pusat-pusat penelitian untuk pengembangan teknologi UKM.

Iklim bisnis yang lebih kondusif dengan melakukan reformasi dan deregulasi perijinan bagi UKM merupakan salah satu strategi yang tepat untuk mengembangkan UKM. Dalam hal ini perlu ada upaya untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi keberlangsungan dan peningkatan kinerja UKM.

KESIMPULAN

Produk inovatif bank syariah berupa *Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA)* yang akan menjadi pembeda dengan bank konvensional diharapkan dapat menjadi *game changer*, karena akan membuka peluang investasi di usaha UMKM dengan bertindak selaku manajer investasi, karena pemodal sebenarnya adalah investor SRIA sendiri. SRIA menjadi produk penghubung antara perbankan syariah dan pemilik modal. SRIA dibangun dengan menggunakan skema *mudharabah muqayyadah* dimana investor menanggung risiko atas investasi tersebut, bank hanya selaku manajer investasi hanya akan menanggung risiko apabila berbuat lalai, fraud atau melanggar kontrak.

Dengan berbagai atribut produk inovatif dalam meningkatkan peran bank syariah terhadap peningkatan ekonomi umat sehingga keberadaan bank syariah dengan atribut

produknya menjadi mitra yang saling membutuhkan dan *trickle down economic* atau ekonomi yang menetes akan memberikan peluang-peluang bagi pelaku ekonomi dalam meningkatkan taraf kesejahteraan.

UMKM akan dapat menyerap tenaga kerja yang besar, sehingga akan mengurangi pengangguran. Pada saat bersamaan dengan berkurangnya pengangguran maka kemiskinan akan berkurang, hal ini dikarenakan tenaga kerja yang terserap oleh UMKM akan memperoleh pendapatan. Adanya peningkatan pendapatan pada gilirannya akan mendorong konsumsi nasional sehingga memacu produksi lebih tinggi dan menjadikan pendapatan nasional menjadi meningkat sehingga proses pembangunan dapat terus berjalan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. (2020). Model dan Skim Inovasi Produk Perbankan Syariah. www.agustiantocentre.com.
- Antonio, Syafii. (2011). *Product Development Process towards More Innovative ShariaBased Product Speakers: Product Development and Innovation towards Sustainability of Islamic Finance Industry*. Jakarta.
- Baswir. (2000). Keterbelakangan Usaha Kecil dan Peningkatan Otonomi Daerah. *Jurnal Analisis Sosial*, hal 47-56.
- C, Anselm. Strauss, J. (2009). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamid, Edy. Suandi. (n.d.). Memperkuat Basis Demokrasi Ekonomi Melalui Pengembangan Ekonomi Rakyat.
- Hart, Keith. (1973). *Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana dalam The Journal of Modern African Studies*.
- <https://knks.go.id/isuutama/16/sria-investasi-baru-produk-keuangan-syariah>. (n.d.).
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jumadi. (2013). *Dampak Implementasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal Di Jawa Timur*. Universitas Brawijaya.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2013). *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM*.
- Laksani, C. . (2010). *Analisis Pro-Growth di Indonesia melalui Identifikasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan*. Universitas Indonesia Depok.
- Lestari, Puji, "Penguatan Ekonomi Industri Kecil dan Menengah Melalui Platform Kluster Industri. *Jurnal Orga. Jurnal Organisasi Dan Manajemen*.
- Lincolin, Arsyad. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mubyarto. (2002). *Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi: Peran Perguruan Tinggi*.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mustika, A. (2010). Analisis Tingkat Pengangguran Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Semarang. [://Eprints.Undip.Ac.Id/364051/DEWI.Pdf](http://eprints.undip.ac.id/364051/DEWI.Pdf).
- Sakirno, Sadono. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada.

Setyobudi, A. (2007). Peran Serta Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan* 5, 2007, 29- 35.

SIPUK dapat diakses melalui website Bank Indonesia/. (n.d.). Dalam rangka mendukung pengembangan jaringan melalui teknologi informasi, pemerintah telah melakukan Pengembangan Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK) sebagai sarana untuk lebih menyebarluaskan secara cepat hasil-hasil penelitian dan .

Suyatna, Hempri. (2010). Reorientasi Kebijakan UMKM di Era Asia China Free Trade Area (ACFTA), *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 13, No 3 Tahun 2010.

Tjiptono, Fandy. (2008). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi.

Tulus, Tambunan. (2001). *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris* (Cetakan ke).

Jakarta.

Wijono, W. (2005). Mengungkap Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Manajemen Dan Fiskal No.V, Jakarta*.

www.depkop.go.id/data-umkm. (n.d.).

www.ojk.go.id/data-statistik-perbankan-indonesiaNo Title. (n.d.).

www.ojk.go.id/data-statistik-perbankan-syariah-indonesia. (n.d.).